

# Desa di Era Digital

(Studi Kasus tentang Inovasi Desa di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)

Ali Rokhman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman

[alirokhman@unsoed.ac.id](mailto:alirokhman@unsoed.ac.id)

## ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan telah berdampak pada perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Perubahan ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat baik masyarakat lapisan menengah ke atas maupun lapisan menengah ke bawah. Perubahan terjadi juga pada lembaga pemerintah baik tingkat pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Walaupun dalam struktur pemerintahan menempati posisi paling rendah, pemerintah desa juga harus bisa menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di mana digitalisasi dalam urusan pemerintah tidak dapat dihindarkan lagi. Desa Dermaji adalah salah satu desa di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang telah siap menghadapi era digital. Dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah diraihnya. Prestasi terbaru pada tahun 2018 desa ini mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Desa dengan Website Informatif. Berbagai prestasi yang telah didapat oleh Desa Dermaji tentu saja melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Keberhasilan yang telah dicapai bukan sekedar kebetulan namun ada proses bagaimana menginternalisasi inovasi dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi kepada perangkat dan masyarakat desa. Paper ini membahas proses inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Dermaji dan bagaimana hasilnya sehingga dapat dijadikan *best practice* bagi desa lain di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Inovasi Desa, Pemerintah Desa, Teknologi Informasi dan Komunikasi

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Semakin besarnya dana yang dialokasikan ke desa menunjukkan bahwa desa menempati posisi yang semakin strategis dan dana yang diterima dapat dijadikan modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa harus dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam bentuk berbagai program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah desa harus mempunyai terobosan inovasi kebijakan dan program dalam memanfaatkan dana desa ini.

Inovasi desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa melalui pemanfaatan Dana Desa secara lebih berkualitas, mulai tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa (Infodesa, 2017).

Pengembangan inovasi desa menjadi suatu keniscayaan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat sekarang ini. TIK sekarang ini sudah masuk desa, masyarakat desa sekarang menjadi bagian dari pengguna TIK. Menurut Kominfo, sekitar 73% desa/kelurahan yang sudah memiliki koneksi internet berbasis teknologi 3G. Sementara untuk jaringan 4G LTE

mencakup 55%. Pada tahun 2019, pemerintah berharap dapat mengkoneksikan lebih dari 83.000 desa/kelurahan yang ada dengan internet berbasis 3G. Target lain di tahun depan, total 514 kabupaten/kota terjangkau oleh jaringan 4G LTE. Dari jumlah tersebut, saat ini baru 64% saja yang telah terpenuhi dengan akses 4G LTE (Yuliasuti, 2018).

Fenomena masifnya penetrasi penggunaan internet yang sampai ke tingkat desa ini perlu ditanggapi oleh pemerintah desa dengan cerdas. Internet harus dapat dijadikan sarana untuk menggali potensi desa dan selanjutnya potensi desa ini diwujudkan menjadi *value* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu desa yang telah merespon fenomena ini adalah Desa Dermaji, desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Desa ini telah banyak menorehkan prestasi dan penghargaan baik tingkat regional maupun nasional. Pada tahun 2014 Desa Dermaji memperoleh penghargaan Sikompak Award PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dermaji berhasil meraih Juara I untuk kategori Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa (PPD). Pada tahun 2016 Desa Dermaji pada mendapatkan penghargaan sebagai Desa Unggulan Pilihan Tempo untuk kategori Desa Melek Teknologi Informasi (Desa Melek IT). Pada tahun yang sama Desa Dermaji menerima Sertifikat Open Defecation Free (Sertifikat ODF) dari Bupati Banyumas. Sertifikat ODF adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada desa yang telah dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). Pada tahun 2018 Desa

Dermaji mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Desa dengan Website Informatif. Disamping penghargaan secara kelembagaan, secara individu Kepala Desa Dermaji, Bayu Setyo Nugroho juga mendapat penghargaan sebagai “Inspiring Young Leader (Tokoh Muda yang Menginspirasi Tahun 2014)” dari Beritasatu.com.

Banyaknya prestasi yang telah diraih Desa Dermaji menimbulkan suatu pertanyaan; Bagaimanakah proses inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Dermaji? Pelayanan publik apa saja yang disediakan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi?

## **METODE PENELITIAN**

Paper ini merupakan hasil studi pendahuluan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Sasaran utama observasi adalah website Pemerintah Desa Dermaji yang beralamat di <https://www.dermaji.desa.id>. Pemilihan informan dengan teknik *purposive* yakni orang yang paling mengetahui tentang Pemerintah Desa Dermaji. Informan kunci penelitian ini adalah Kepala Desa Dermaji. Triangulasi sumber digunakan untuk mengontrol keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan Model Analysis Mengalir (Flow Analysis Model) di mana tiga komponen analisis yakni reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saling mengalir (Miles, Huberman, dan Saldana, 1994).

Penelitian ini berfokus pada: (1) bagaimana proses lahirnya inovasi di Desa Dermaji khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, (2) Manfaat yang diperoleh dari inovasi desa dalam bentuk pelayanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil *Key Informant*

Studi ini berfokus pada satu *Key informant* atau informan kunci yakni Kepala Desa Dermaji yang bernama Bayu Setyo Nugroho, saat ini menjabat sebagai kepala desa dalam periode ketiga. Profil informan kunci ini tidak sulit untuk ditemukan karena kepala desa Dermaji ini sudah menjadi tokoh publik yang sering dimuat profilnya karena prestasinya. Berikut profil lengkap informan (Suparyo, 2018).

Tabel 1. Identitas Informan

Nama Lengkap	Bayu Setyo Nugroho
Tempat/Tanggal Lahir	Banyumas, 17 Juni 1975
Alamat	Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD Negeri 1 Dermaji</li> <li>2. SMP Negeri 1 Purwokerto</li> <li>3. SMA Negeri 1 Purwokerto</li> <li>4. Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman</li> <li>5. Magister Ilmu Adminstrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman</li> </ol>
Jabatan	Kepala Desa Dermaji
Website	<a href="https://bayunugroho.id/">https://bayunugroho.id/</a>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Proses Lahirnya Inovasi** Pencapaian prestasi Desa Dermaji sampai sejauh ini tidak lepas dari peran kepala desanya. Berdasarkan pengakuan dari kepala desa, semua ini bermula dari Gerakan Desa Membangun (GDM) yang dia gagas pada tahun 2011 bersama koleganya sesama kepala desa waktu itu yakni Agung Budi Satrio Kepala Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, Munawar Kepala Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan Yana Noviadi Kepala Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana dimuat di laman <http://arah.com>, GDM pertama kali terbentuk di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas pada tahun 2011. Saat itu, Pemerintah Desa Melung menyelenggarakan Lokakarya Desa Membangun (LDM) dengan mengundang Pemerintah Desa Mandalamekar, Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya sebagai kawan diskusi. Desa Mandalamekar berhasil menerapkan strategi baru dalam mengelola sumber daya desa, seperti pertanian, hutan desa, dan konservasi sumber mata air secara mandiri sehingga menyabet penghargaan dalam bidang konservasi alam. Semangat itu menginspirasi desa-desa di Banyumas untuk melakukan gerakan secara kolektif, maka lahirlah Gerakan Desa Membangun (GDM). GDM merupakan inisiatif kolektif desa-desa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik. Gerakan ini lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah

(top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up).

Kegiatan yang dilakukan oleh GDM antara lain; mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien, pengembangan tata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, GDM juga mengelola Sumber Daya Desa yang berkelanjutan dengan kearifan kolektif masyarakat desa, serta penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan berbasis sumber terbuka (open source). Uniknya, GDM juga memberikan perlindungan warga desa yang migrasi ke luar negeri atau buruh migran (Famela, 2016).

“Gerakan Desa Membangun itu beda dengan gerakan membangun desam yang ada selama ini. Kalau membangun desa itu kan desa menjadi ketergantungan dengan dunia luar, seakan mengharapkan bantuan dari pihak eksternal untuk membangun. Tetapi kalau desa membangun ya komponen desa itu yang lebih aktif. Malah nantinya tak menutup kemungkinan menjadi pusat peradaban”. Hal ini disampaikan oleh informan ketika diwawancarai detikcom pada tanggal 29 Juni 2015.

Dengan bekal ijazah sarjana dan magister, Bayu menggagas ide Desa 2.0 yang memanfaatkan teknologi informasi, dan mengembangkan website Desa Dermaji yang beralamat di <https://www.dermaji.desa.id/>. Website ini lebih unggul daripada desa-desa lainnya karena lebih terupdate dan

pengunjungnya juga cukup banyak sebagaimana data berikut.

Tabel 2. Statistik Pengunjung Website per 1 Maret 2019

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T
	a	e	a	p	e	u	u	a	s	o	e		o
	n	b	r	r	i	n	l	g	e	k	v	s	t
	a	n	r	r	i	n	l	u	p	t	v	s	a
													l
2016				1853	2130	1973	1796	586	475	407	483	392	3195
2017	4495	3969	5098	3855	4233	3762	3421	3681	4634	5077	4020	3266	5306
2018	3293	2888	3681	3831	3887	3583	3883	2883	2371	2638	1954	2677	3660
2019	24112	19414	3443										4359

Sumber: Admin <http://dermaji.desa.id>

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas dapat disarikan bahwa ide awal inovasi desa adalah murni dari bawah dan bersumber dari kegiatan swadaya. Informan pun menyampaikan bahwa di awal perjuangannya peran pemerintah di atasnya baik kecamatan, kabupaten, propinsi, maupun pemerintah pusat boleh dikatakan tidak ada. Pemerintah banyak hadir setelah memperoleh prestasi.

Kasus di Desa Dermaji ini membuktikan bahwa perencanaan yang berasal dari bawah (bottom-up) cenderung akan lebih berhasil. Hal ini sejalan dengan pendapat berikut yang menyatakan bahwa perencanaan dari bawah akan memotivasi para anggota untuk lebih semangat dalam mencapai tujuan.

*“The advantage of bottom-up planning is that the team members, i.e. the people who are actively working on the project, have a say in the project planning and decisions are made collaboratively. This will improve team communication and team building, and also empowers the team members. As a result it will motivate them to do their best to achieve the project goals” (Tran, 2019).*

## **Hasil Inovasi Desa dalam bentuk Pelayanan Publik**

Salah satu hasil inovasi desa dari Desa Dermaji adalah adanya pengakuan dari pemerintah dalam bentuk penghargaan. Desa Dermaji bersama sejumlah desa lain, yakni Desa Kanekes Lebak Banten, Desa Swargabara Kutai Timur Kalimantan, Desa Sepahat Bengkalis Riau, Kampung Nendali Jayapura Papua, dan Kampung Yakonde Jayapura Papua mendapatkan penghargaan Destika Desa.Id 2016 atau dikenal dengan Destika Desa.Id Award 2016. Penghargaan diberikan oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary pada tanggal 28 September 2016 disaksikan oleh Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjoyo, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus sebagai Ketua Festival Destika 2016 Budiman Sudjatmiko, Staf Ahli Kementerian Kominfo Bidang Teknologi Woro Indah Widiastusi dan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw. Pemberian penghargaan dilakukan ditengah-tengah pembukaan acara Festival Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016, yang dilaksanakan di Khalkote Sentani Timur Jayapura Papua (Kabar Desa Dermaji, 2016). Penghargaan ini membuktikan bahwa Desa Dermaji telah dikukuhkan oleh pemerintah

sebagai desa yang telah melakukan inovasi dengan menerapkan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Undang-Undang Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Berdasarkan undang-undang ini pemerintah desa adalah penyelenggara pelayanan publik.

Sesuai dengan fokus dari studi ini yakni inovasi desa dan pelayanan publik yang dikaji adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui TIK dalam hal ini yang termuat dalam website pemerintah Desa Dermaji. Website Desa Dermaji menyediakan menu layanan yang dibagi dalam Layanan Sosial Dasar, Layanan Administrasi, dan Layanan Informasi sebagaimana disajikan dalam gambar beriku Gambar 1. Beranda Website Desa Dermaji



Bagi pengunjung web tersebut menu layanan sosial dasar sangat mungkin ditafsirkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah desa yang dapat diselenggarakan secara online. Namun kenyataannya desa ini belum bisa menyelenggarakan pelayanan sosial dasar secara langsung hanya menampilkan data statistik tentang pelayanan air bersih dan pelayanan pendidikan anak usia dini. Sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2. Statistik Layanan Dasar Desa Dermaji



Pelayanan administrasi juga demikian, tidak langsung memberikan pelayanan administrasi secara online, hanya menampilkan prosedur pelayanan. Prosedur tentang pelayanan KTP, surat pindah, kartu keluarga, dan SKCK. Pengguna layanan tetap harus datang ke kantor desa, sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 3. Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Dermaji



Pelayanan yang langsung bisa diminta secara online hanya berupa permintaan informasi sebagaimana dinyatakan dalam menu Layanan Informasi dengan kalimat:

“Sesuai dengan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah Desa Dermaji berkomitmen memberikan informasi dan data terbaru melalui situs web ini. Namun demikian, jika ada informasi dan data lain yang membutuhkan format tertentu, Anda dapat mengajukan permohonan informasi

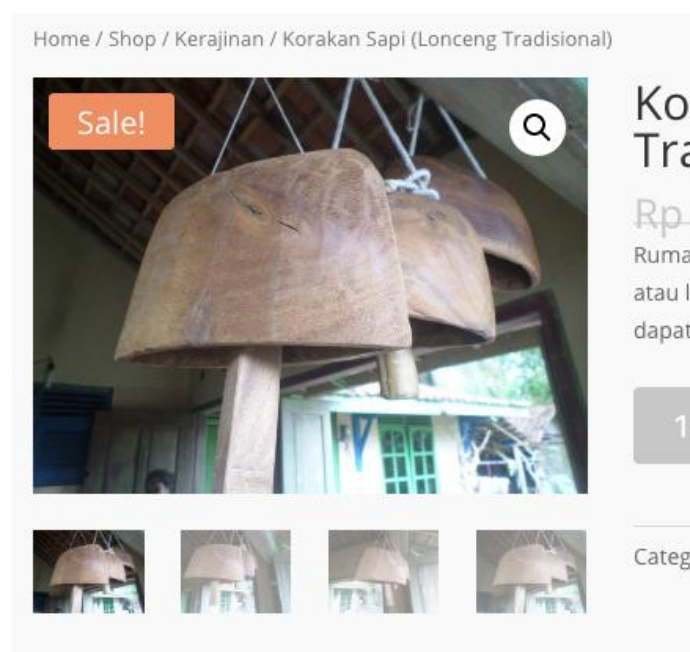
- Langsung di Kantor Sekretariat Desa Dermaji;
- Melalui surat elektronik : pemdes@dermaji.desa.id atau
- Melalui formulir di laman ini”

Tidak bisanya desa langsung memberikan pelayanan secara online bukan karena hambatan teknologi namun lebih disebabkan karena wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas. Pemerintah desa hanya sekedar membuatkan surat pengantar ke pemerintah di atasnya, kecamatan dan kabupaten. Ketiadaan wewenang ini menunjukkan bahwa desa tidak mempunyai otonomi dalam pelayanan publik. Bahkan oleh Nurcholis (2014), pemerintah desa dikatakan sebagai pemerintahan palsu karena berbagai sebab yang melatarbelakangi. Jika desa benar-benar mempunyai otonomi maka masyarakat desa sudah menikmati pelayanan pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, irigasi pertanian modern, transportasi perdesaan,

administrasi kependudukan dan perizinan publik yang selesai di tempat (bukan dilempar ke kecamatan dan SKPD lain), jalan desa yang beraspal, penerangan jalan, industri pengolahan hasil bumi, air bersih, administrasi pertanahan modern, dan aliran listrik

Salah satu keunggulan desa Dermaji dari desa-desa lainnya dalam melayani warganya adalah websitenya telah menyediakan layanan penjualan komoditas atau produk desa secara online. Pada menu Belanja pengunjung ditawarkan untuk berbelanja berbagai produk asli warga Desa Dermaji seperti gula kelapa, kerajinan tangan, makanan khas desa, bahkan benda antik buatan warga yang sangat langka seperti lonceng tradisional berupa kolakan sapi, sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 4. Toko Online



Pelayanan Pemerintah Desa Dermaji dalam menyediakan toko online ini menjadi poin tersendiri yang menunjukkan desa ini telah siap dalam era digital. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Dermaji, sudah banyak calon

pembeli yang menghubungi untuk membeli produk-produk tersebut namun masih terkendala sumberdaya manusia yang masih terbatas. Penghasil produk adalah orang desa yang internet literasinya masih rendah sehingga tidak bisa secara angung berhubungan dengan pembeli. Masih dibutuhkan tenaga khusus penjualan yang mempunyai posisi di tengah di antara seller dan buyer. Untuk ini kepala desa sudah mempunyai rencana untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang sudah dibekali dengan ketrampilan *online marketing* dapat menawarkan berbagai produk desa Dermaji baik lewat website desa maupun media sosial. Selama ini BUMDes belum digerakkan secara maksimal. Padahal menurut Prabowo (2014) kewirusahaan dapat dikembangkan dan diwadahi dalam BUMDes yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

## KESIMPULAN

Inovasi desa yang dilakukan oleh Desa Dermaji melalui proses yang panjang dimulai dari Gerakan Desa Membangun (GDM) yang merupakan inisiatif murni dari bawah tanpa melibatkan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat banyak terlibat setelah desa ini diakui prestasinya.

Desa Dermaji adalah salah satu desa di Indonesia yang telah siap dalam memasuki era digital. Dibuktikan dengan website yang sangat dinamis, dengan jumlah pengunjung yang banyak, dan menyediakan menu yang dapat untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah



desa. Salah satu keunggulan website desa ini disamping desa yang lain adalah adanya menu toko online untuk memasarkan komoditas desa melalui internet.

Desa-desanya lain perlu belajar dari Desa Dermaji. Desa harus bisa memanfaatkan momentum yang sedang terjadi saat ini yakni adanya alokasi dana desa yang makin tahun makin besar dan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Desa harus bertindak responsif dalam momentum ini melalui inovasi-inovasi khas desa, tidak perlu menunggu program dari pemerintah pusat.

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Untuk membangkitkan inovasi desa seperti Desa Dermaji perlu kolaborasi dari semua pihak. Desa yang telah berhasil, virus keberhasilannya harus disebarluaskan ke desa lain. Disamping itu perguruan tinggi juga perlu dilibatkan karena pusat pemikiran dan inovasi lebih banyak berada di perguruan tinggi dengan lembaga penelitiannya.

Studi ini masih merupakan studi pendahuluan perlu dilanjutkan lebih mendalam dan lebih lengkap kajiannya, dengan menambah kasus dari desa lain yang mempunyai keunikan dalam inovasi desa sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih utuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bertambahnya kesejahteraan masyarakat desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Famela, J. A. (2016, October 26). Retrieved from Gerakan Desa Membangun: Semangat Demi Desa Yang Lebih Baik: <https://www.arah.com/article/14131/gerakan-desa-membangun-semangat-demi-desa-yang-lebih-baik.html>
- Infodesa. (2017, December 10). Info Desa. Retrieved February 29, 2019, from Pengertian Inovasi Desa dan Tujuannya : <https://risehtunong.blogspot.com/2017/12/pengertian-inovasi-desa-dan-tujuannya.html>
- Inloox. (2016, July 22). Retrieved Feb 20, 2019, from Back to Basics (8): Top-Down Versus Bottom-Up Project Planning: <https://www.inloox.com/company/blog/articles/back-to-basics-8-top-down-versus-bottom-up-project-planning/>
- Kabar Desa Dermaji. (2016, September 29). (Sep 29, 2016 ) Retrieved February 15, 2019, from Desa Dermaji Raih Penghargaan Destika Desa.Id 2016: <https://www.dermaji.desa.id/desa-dermaji-raih-penghargaan-destika-desa-id-2016/>
- Kementerian Keuangan RI. (2018). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . Retrieved February 20, 2019, from Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>
- Miles, M. M., Huberman, M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Nurcholis, H. (2014). *Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Jakarta: Bee Media.

- Prabowo , T. E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainability Poverty Alleviation Model Village Community in Bleberan Gunung Kidil, Indonesia. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice):, 19-26.
- Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Suparyo, Y. (2018, May 2). Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal. Retrieved February 10, 2019, from Bayu Setyo Nugroho: Dari Iseng Menuju Pengabdian Tanpa Batas pada Desa: <https://inovasidesa.kemendesa.go.id/bayu-setyo-nugroho-dari-iseng-menuju-pengabdian-tanpa-batas-pada-des/>
- Tran, L. (2019, July 22). Retrieved from Back to Basics (8): Top-Down Versus Bottom-Up Project Planning: <https://www.inloox.com/company/blog/articles/back-to-basics-8-top-down-versus-bottom-up-project-planning/>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Retrieved February 10, 2019, from Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: [www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)
- Yuliasuti, D. (2018, May 28). Digination. Retrieved February 26, 2019, from Tantangan Terberat Membangun Jaringan Internet di Pedesaan: <http://www.digination.id/read/011385/tantangan-terberat-membangun-jaringan-internet-di-pedesaan>